

ABSTRAK

Ketahanan pangan merupakan kondisi ketika setiap individu, setiap saat, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan hidup aktif dan sehat. Indonesia sebagai negara berpenduduk ke-4 terbesar di dunia masih menghadapi tekanan ketahanan pangan yang serius, tercermin dari impor beras sebesar 364.300 ton senilai Rp2,97 triliun pada tahun 2025. Kabupaten Klaten, sebagai produsen padi ke-11 di Jawa Tengah dengan total produksi 355.717 ton padi dan 204.558 ton beras, memiliki peran strategis sebagai penghubung Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, wilayah ini menghadapi tekanan multidimensional berupa penyusutan lahan sawah produktif sebesar 1.536 hektar dalam satu dekade akibat alih fungsi lahan, inflasi harga beras sebesar 22,70% dalam lima tahun, peningkatan jumlah penduduk miskin dari 15,69% menjadi 51,05%, serta naiknya prevalensi stunting dari 10,63% menjadi 13,9%. Kondisi ini mencerminkan bahwa ketahanan pangan Klaten bersifat multidimensional dan tidak merata antar kecamatan, sehingga pendekatan kebijakan seragam tidak lagi memadai.

Penelitian ini bertujuan memetakan tipologi prioritas wilayah ketahanan pangan berbasis komoditas beras untuk mendukung pengembangan wilayah antar kecamatan di Kabupaten Klaten. Metode yang digunakan meliputi analisis statistik terhadap 12 indikator dari empat pilar ketahanan pangan yang disesuaikan potensi lapangan yaitu ketersediaan (*availability*), aksesibilitas (*accessibility*), pemanfaatan (*utilization*), dan stabilitas (*stability*). Secara komparatif pada 26 kecamatan di Kabupaten Klaten antara tahun 2020 dan 2025. Keluaran penelitian berupa tipologi prioritas wilayah yang menjadi landasan perencanaan pengembangan wilayah berbasis bukti (*evidence-based planning*) yang responsif dan tepat sasaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tiga tahapan analisis. Pertama, analisis statistik deskriptif terhadap 12 indikator yang merepresentasikan keempat pilar; diadaptasi dari *Global Food Security Index (GFSI)* sesuai ketersediaan data lokal. Kedua, pembobotan objektif menggunakan *Entropy Weighting Method (EWM)* guna menghasilkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) berdasarkan variasi empiris data antar kecamatan tanpa subjektivitas pakar. Ketiga, analisis spasial menggunakan *Local Moran's I (LISA)* dengan matriks pembobot spasial *Queen Contiguity* dan uji signifikansi permutasi Monte Carlo ($\alpha = 0,05$) untuk mendeteksi kluster ketahanan dan kerawanan pangan secara lokal. Kombinasi IKP dan klasifikasi LISA Prioritas 1 (Sangat Rawan), Prioritas 2 (Rawan), Prioritas 3 (Tahan), dan Prioritas 4 (Sangat Tahan) yang menjadi empat tipologi prioritas wilayah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilar pemanfaatan (*utilization*) mendominasi bobot IKP sebesar 33-44% diikuti aksesibilitas 31-32%, stabilitas 15-17%, dan ketersediaan 14%. Dari 26 kecamatan, terdapat 4 kecamatan tergolong Prioritas 1 (sangat rawan), 8 kecamatan Prioritas 2 (rawan), 7 kecamatan Prioritas 3 (tahan), dan 7 kecamatan Prioritas 4 (sangat tahan). Ditemukan paradoks bahwa kecamatan dengan basis pertanian tinggi seperti Kemalang, Manisrenggo, dan Karangnongko justru tergolong sangat rawan akibat lemahnya aksesibilitas dan pemanfaatan pangan. Analisis temporal mengidentifikasi tiga pola dinamika yaitu stagnasi, resiliensi membaik (Gantiwarno, Cawas) dan resiliensi memburuk (Jatinom). Penelitian membuktikan surplus ketersediaan pangan tidak dengan sendirinya menjamin ketahanan pangan apabila aksesibilitas ekonomi dan kapasitas pemanfaatan gizi belum terpenuhi secara bersamaan suatu hierarki fungsional yang mengharuskan pemenuhan seluruh pilar secara integratif. Kombinasi IKP LISA terbukti efektif menghasilkan IKP yang objektif sekaligus *spatially sensitive*, mampu mendeteksi kluster kerawanan yang tidak terungkap melalui analisis agregat konvensional. Penelitian ini merekomendasikan intervensi pembangunan wilayah yang terdiferensiasi berdasarkan tipologi prioritas, meliputi: penguatan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) melalui peraturan daerah; rehabilitasi aksesibilitas infrastruktur terpadu bagi wilayah Prioritas 1 dan 2; penguatan cadangan pangan desa; serta pelembagaan pemantauan IKP berkala sebagai mekanisme peringatan dini lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Temuan ini diharapkan menjadi landasan empiris bagi Pemerintah Kabupaten Klaten dalam merumuskan kebijakan ketahanan pangan yang responsif, terdiferensiasi, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Ketahanan Pangan, Indeks Ketahanan Pangan, Tipologi Prioritas Wilayah

Keywords : Food Security, Food Security Index, Regional Priority Typology